



www.tnp2k.go.id

SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bambang Widianto

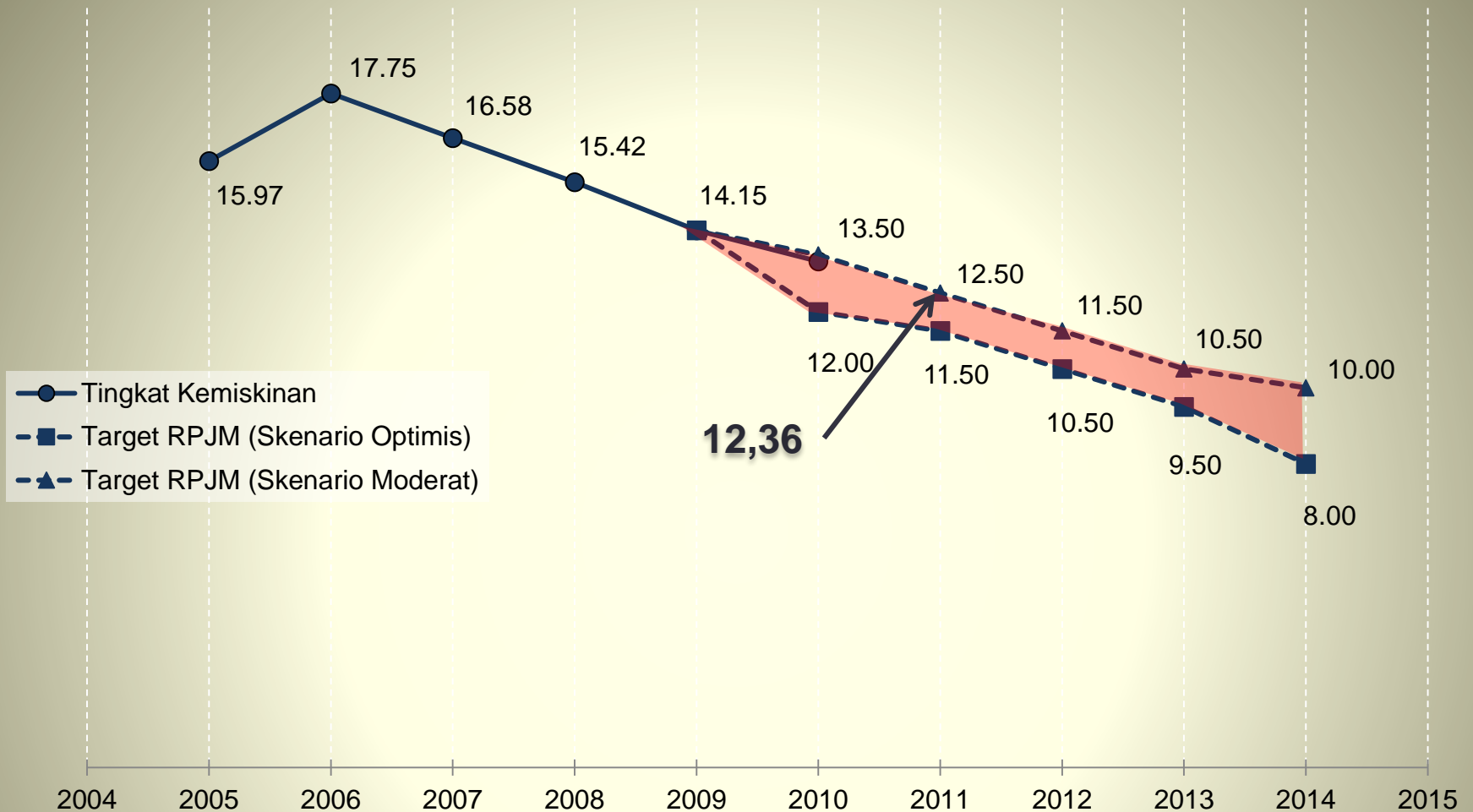
Deputi Setwapres Bidang Kesra dan
Penanggulangan Kemiskinan
Sekretaris Eksekutif TNP2K

Badung, 10 April 2012

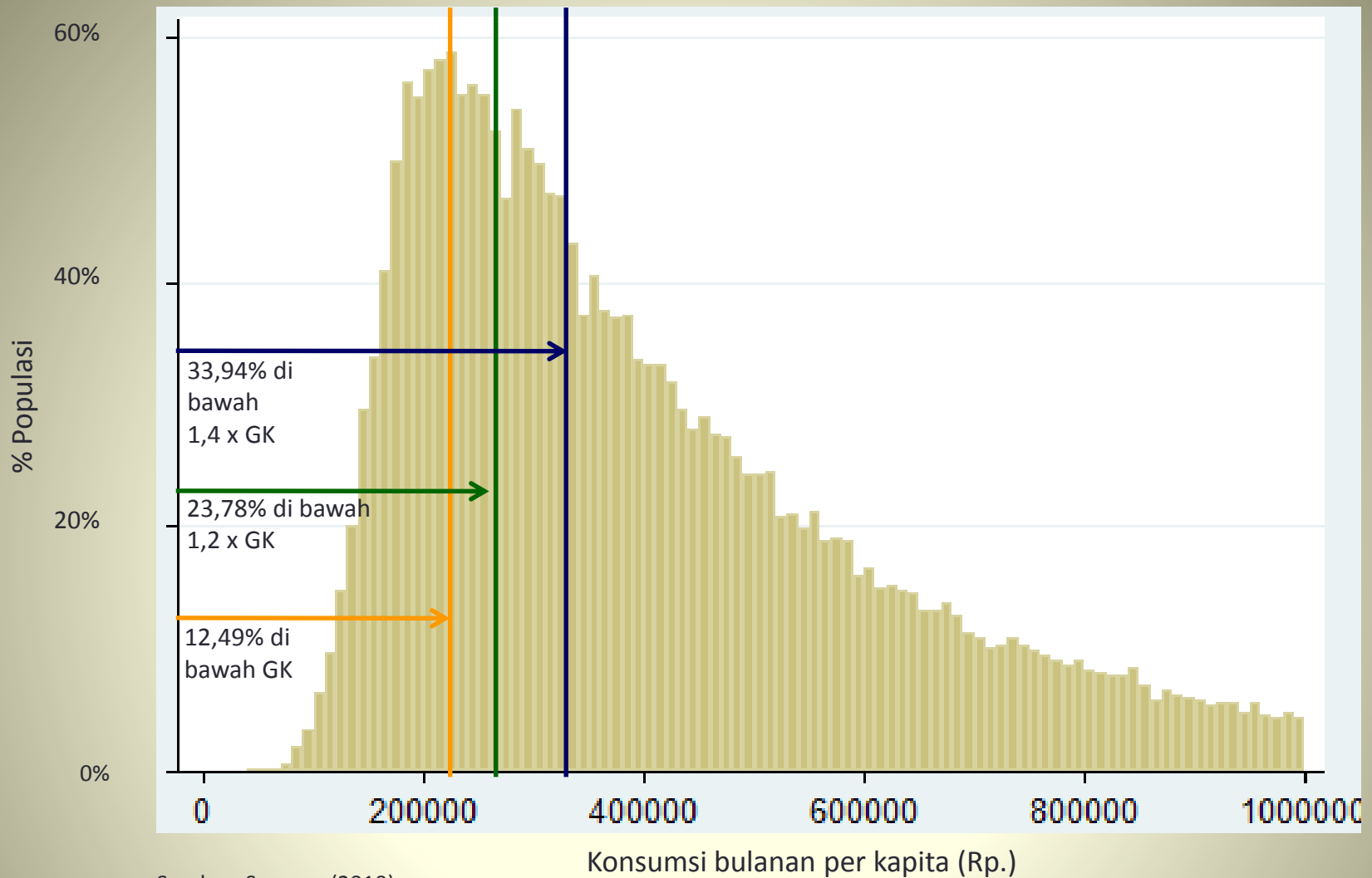


1

TANTANGAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Tingkat Kemiskinan dan Target Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: Susenas (2010)

Distribusi Konsumsi Perkapita Penduduk Indonesia



14,7 juta
penduduk keluar
melewati garis
kemiskinan

MARET 2009 – MARET 2010

Net 1,5 juta
penduduk keluar
dari kemiskinan

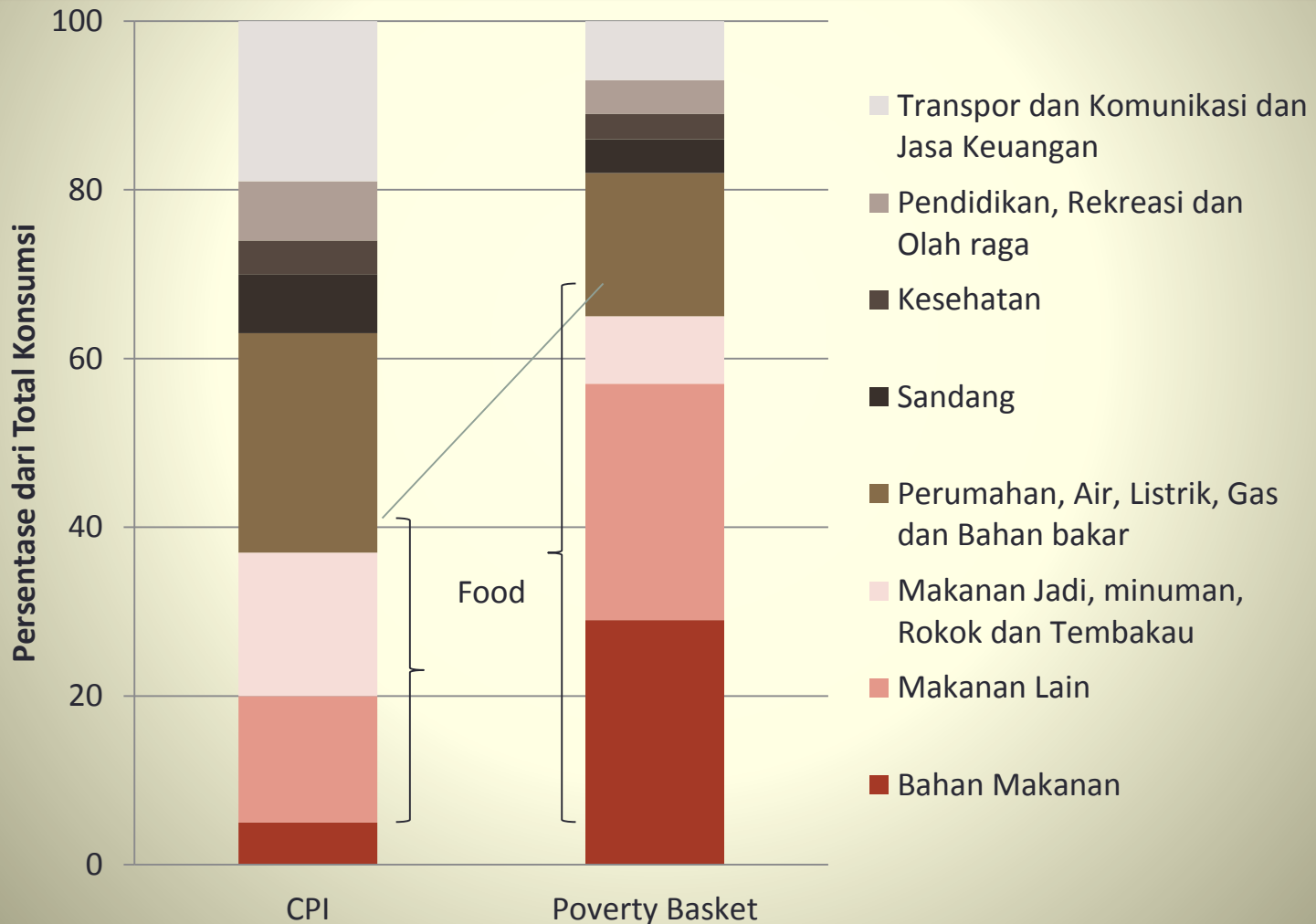


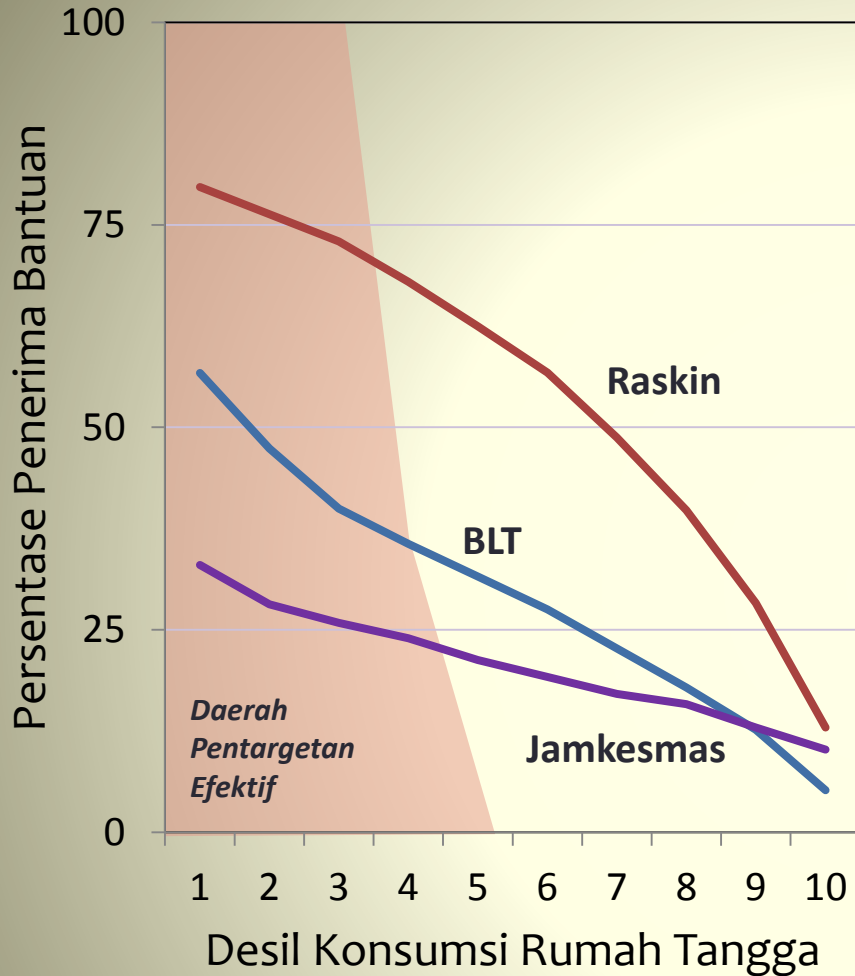
13.2 juta
penduduk masuk
kembali ke
bawah garis
kemiskinan

GK

Dinamika di Sekitar Garis Kemiskinan

Masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan karena 2/3 dari konsumsi mereka adalah pada konsumsi pangan sementara golongan lain lebih terpengaruh pada kenaikan bahan bakar (BBM)





Sumber: Susenas 2009

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Efektivitas Perlindungan Sosial bagi Penduduk Miskin



2

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1

**MENINGKATKAN
PROGRAM PERLINDUNGAN
SOSIAL**

Bantuan Sosial Berbasis
Keluarga

2

**MENINGKATKAN AKSES
RUMAHTANGGA PADA
PELAYANAN DASAR**

Dukungan ketersediaan layanan
pendidikan dan kesehatan

3

**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Keputusan masyarakat
terhadap kebutuhan
masyarakat

4

**PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS DAN
INKLUSIF**

UMKM, iklim usaha,
infrastruktur/konektivitas,
pembangunan pertanian

Arah Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

2

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

3

Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil

4

Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

1

Bantuan sosial berbasis individu, rumah tangga atau keluarga

2

Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat

3

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil

4

Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

“Dynamic Poverty”

- Dinamika keluar masuk penduduk dari dan ke bawah garis kemiskinan

Kompensasi

- Penduduk miskin harus diberi kompensasi jika dirugikan oleh perubahan kebijakan

Promosi

- Penduduk miskin harus diberi kesempatan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak

Perlindungan

- Penduduk miskin harus dilindungi dari kemungkinan goncangan (shock) dalam kehidupan mereka

Arti Penting Perlindungan Sosial

Prioritas Jangka Pendek-Menengah TNP2K

1

Unifikasi Sistem
Penargetan
Nasional (PPLS
2011)

2

Menyempurnakan
Pelaksanaan
Bantuan Sosial
Kesehatan untuk
Keluarga Miskin

3

Menyempurnakan
Pelaksanaan dan
Memperluas
Cakupan Program
Keluarga Harapan
(PKH)

4

Integrasi Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Lainnya ke dalam
PNPM

5

Menyusun Peta
Jalan Sistem
Keuangan Inklusif

SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL

- **Sistem Penetapan Sasaran Nasional** adalah suatu sistem penetapan sasaran keluarga yang berhak mendapatkan program perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah (Pusat dan Daerah).
- Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabila mampu secara tepat mengurangi *exclusion error* dan *inclusion error*.
- Keberadaan satu basis data (*unified*) akan memperbaiki efektivitas Program Perlindungan Sosial

	Miskin	Tidak Miskin
Menerima Bantuan	<input checked="" type="checkbox"/>	✘ <i>Inclusion Error</i>
Tidak Menerima Bantuan	✘ <i>Exclusion Error</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

**Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial**

*Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah
Daerah penyelenggara Program*

**Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial**

*Kriteria diterapkan kepada
Basis Data Terpadu*

Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

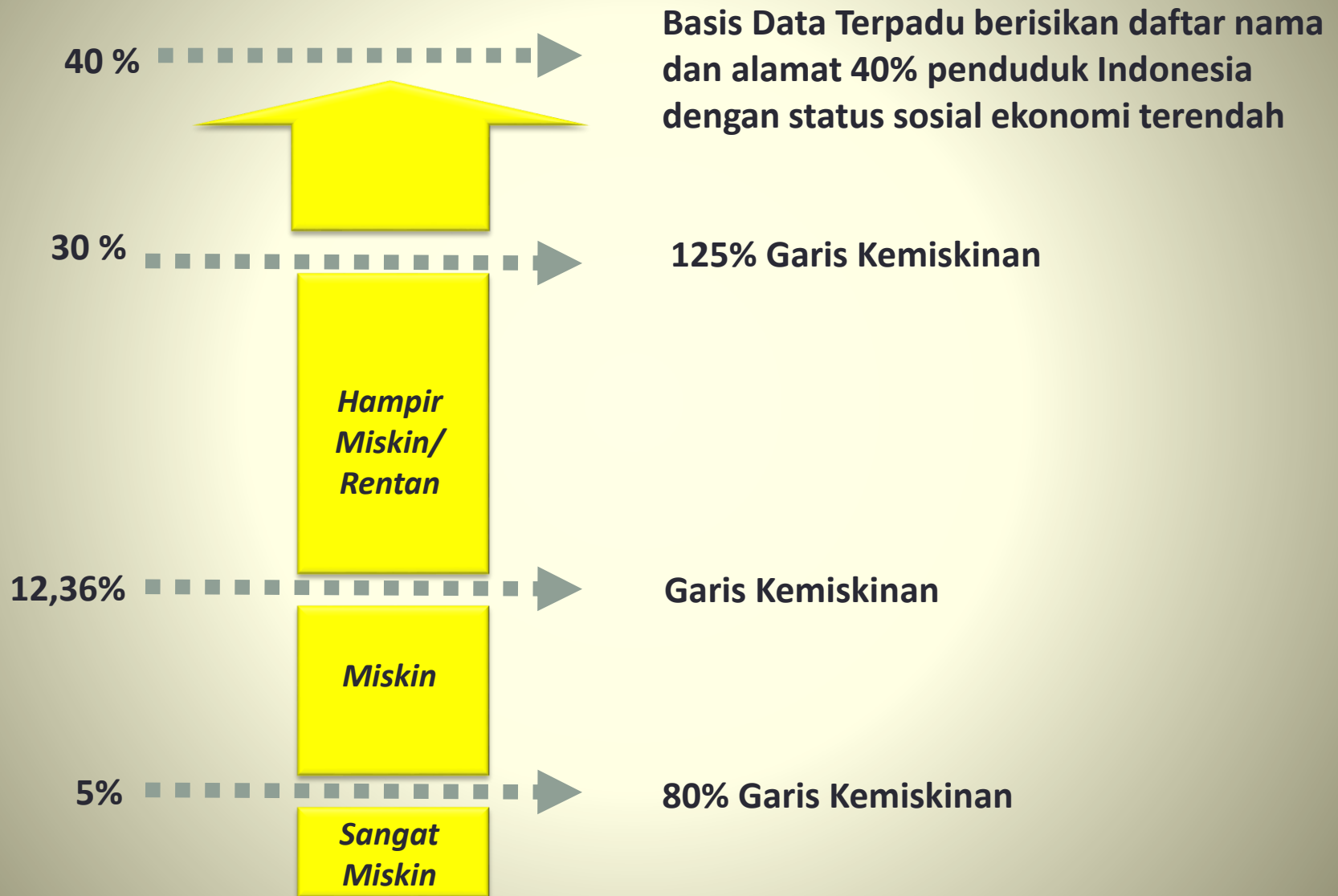
Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga sasaran
masing-masing program*

**Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga**

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU



BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Dengan sumber utama dari PPLS 2011, Basis Data Terpadu berisikan nama dan alamat 40% rumah tangga di Indonesia dengan kondisi kesejahteraan terendah

Prinsip Dasar

- Fleksibel mengakomodasi kebutuhan unit intervensi program (individu, keluarga, RT)
- Fleksibel mengakomodasi kriteria kepesertaan program (berdasarkan status kesejahteraan, lokasi administrasi, status demografis, dll)
- Pengukuran status kesejahteraan berdasarkan metode ilmiah, kriteria yang *comparable* dengan mengakomodasi kondisi lokal, dan kelengkapan informasi dasar
- Dapat diakses secara luas oleh Program dengan memperhatikan privasi informasi individu/keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:

1

Menyediakan Layanan Program

- Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program
- Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu

2

Melakukan Riset

- Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

3

Membangun Sistem Informasi

- Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi
- Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

AKSES TERHADAP

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Untuk keperluan Program, K/L dan Pemda terkait menyampaikan permintaan data kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan menguraikan:

- Nama dan tujuan Program yang akan dijalankan
- Cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial) yang akan dijalankan
- Data pendukung yang diperlukan

Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan K/L dan Pemda menyiapkan daftar nama & alamat sasaran serta data pendukung lainnya.

Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa biaya apapun.

Untuk memastikan integritas data diperlukan Nota Kesepakatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama & alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan dipakai untuk keperluan Program Perlindungan Sosial

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012

Raskin

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru

PKH

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014

Subsidi Siswa

- Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud

Pemda

- Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah

Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untuk keperluan khusus seperti monitoring dan evaluasi (contoh oleh UKP4)

SOSIALISASI PENGGUNAAN

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Sosialisasi kepada *stakeholders* program yang menjadi pengguna Basis Data Terpadu

Bersama-sama dengan K/L dan Pemda terkait untuk;

- Merumuskan rencana sosialisasi
- Mendistribusikan informasi penggunaan Basis Data Terpadu
- Mengkaji perbaikan yang dapat dilakukan dalam hal mekanisme penetapan sasaran masing-masing program

Sosialisasi kepada calon pengguna potensial Basis Data Terpadu

Sekretariat TNP2K mengembangkan strategi sosialisasi yang proaktif dengan memperhatikan karakteristik masing-masing calon pengguna potensial

PENANGANAN KELUHAN PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

1

Keluhan mengenai pelaksanaan Program

- Keluhan mengenai pelaksanaan Program perlu ditangani secara serius oleh mekanisme penanganan keluhan yang ada di masing-masing Program

2

Keluhan mengenai kepesertaan Program

- Kesesuaian dengan kriteria kepesertaan yang ditetapkan masing-masing Program
- Penetapan mekanisme tindak lanjut seperti re-survey, re-sertifikasi, re-verifikasi, dsb. akan dirumuskan oleh Sekretariat TNP2K bersama masing-masing Program

PEMANFAATAN LAINNYA

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Riset dan Studi untuk memperbaiki ketepatan sasaran Program Perlindungan Sosial di Indonesia, oleh lembaga penelitian dan universitas
- Pemanfaatan untuk kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang ingin bersinergi dengan kegiatan Pemerintah
- Informasi bagi masyarakat umum mengenai cakupan, sebaran, dan karakteristik Basis Data Terpadu – disajikan secara agregat

→ Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa nama dan alamat



3

**KELEMBAGAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

TNP2K

- Penyusunan kebijakan dan program
- Sinergi program K/L
- Pengawasan dan Pengendalian program

TKPK PROVINSI

- Koordinasi penyusunan dan evaluasi SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
- Pengendalian pelaksanaan program

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TKPK KOTA

- Koordinasi penyusunan dan evaluasi SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
- Pengendalian pelaksanaan program

TKPK KABUPATEN

- Koordinasi penyusunan dan evaluasi SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
- Pengendalian pelaksanaan program

KETUA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA I MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA II MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Anggota

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Pendidikan Nasional
6. Menteri Pekerjaan Umum
7. Menteri Koperasi dan UKM
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Menteri PPN/Kepala Bappenas
10. Kepala UKP4
11. Sekretaris Kabinet
12. Kepala BPS
13. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh ketua

Tim Pembiayaan

KETUA MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPALA BAPPENAS

SEKRETARIS EKSEKUTIF
DEPUTI SESWAPRES
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kelompok kerja pengendali
Bantuan Sosial Terpadu
berbasis Keluarga

Kedeputian Seswapres Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan

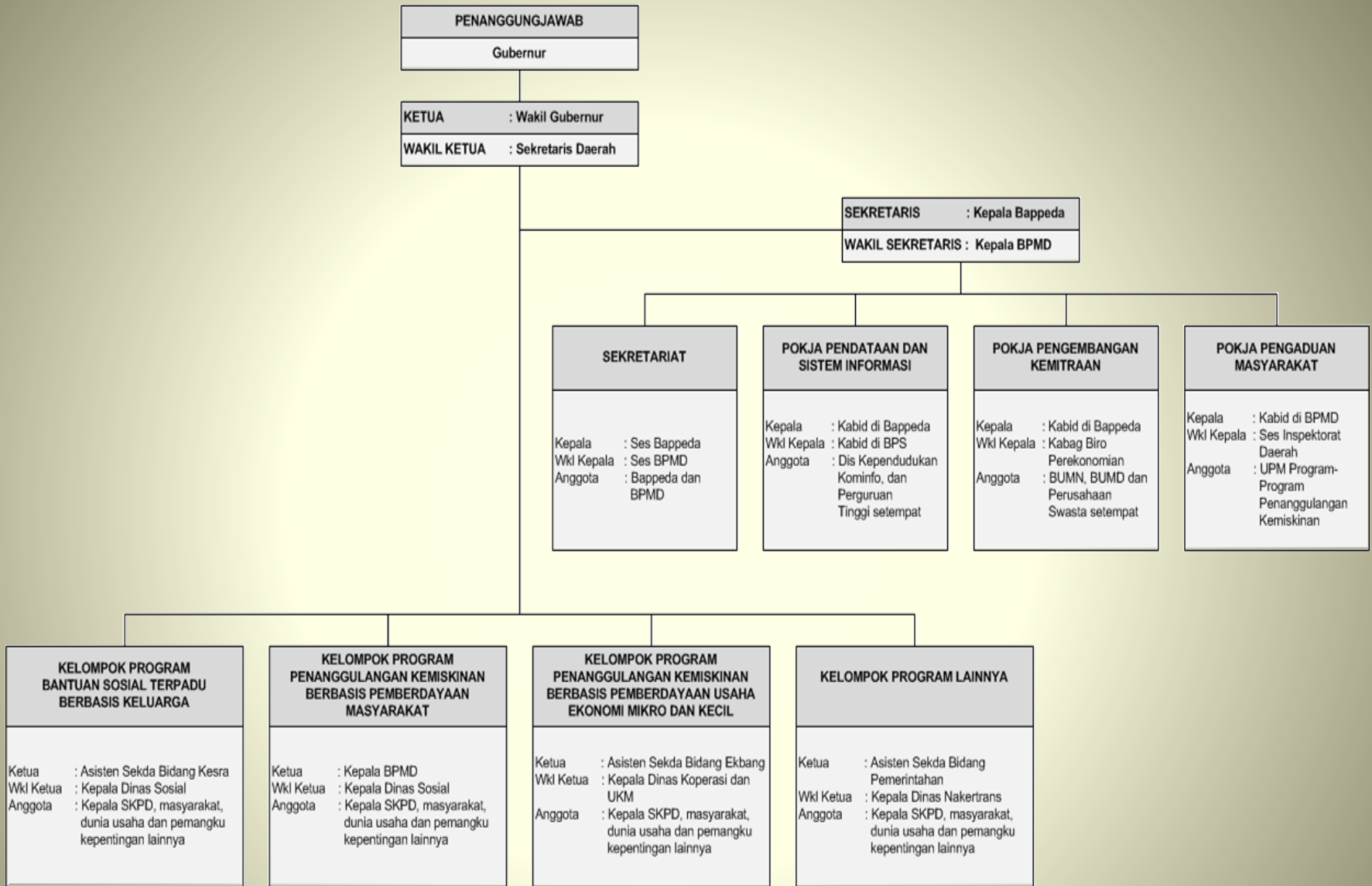
Kelompok kerja pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM Mandiri)

Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

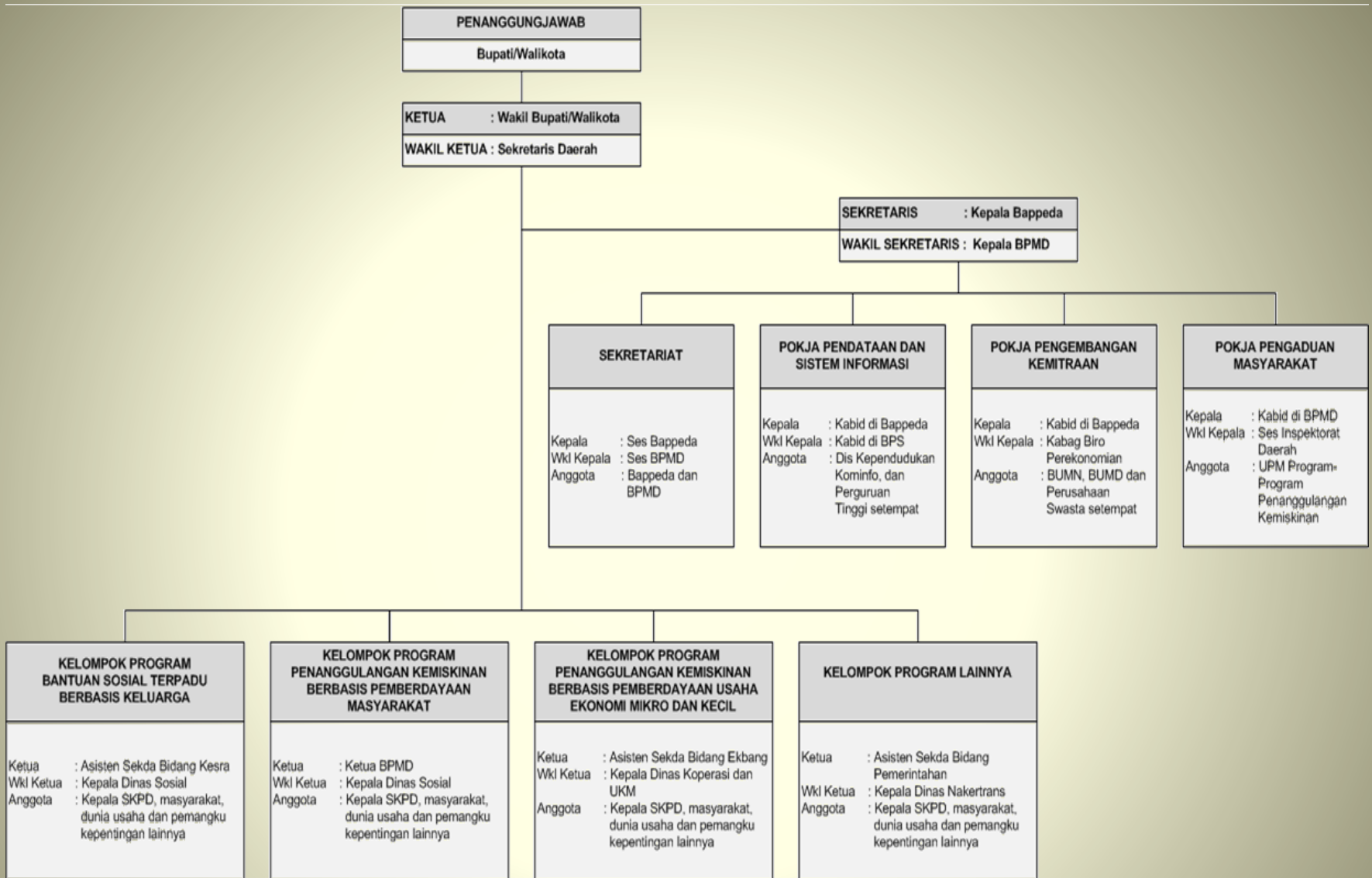
Kelompok kerja pengendali
Program Penanggulangan
Kemiskinan berbasis Pemberdayaan
Usaha Mikro dan kecil

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Struktur TNP2K



Struktur TKPK Provinsi



Struktur TKPK Kabupaten/Kota



TNP2K

- Mendukung pengembangan kapasitas TKPK dalam merancang prioritas intervensi dan mengevaluasi keberpihakan anggaran pada penanggulangan kemiskinan
- Menyediakan Basis Data Terpadu Kemiskinan sebagai basis penargetan program Perlindungan Sosial



TKPK

- Memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran yang pro-poor oleh SKPD terkait di daerah.
- [Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.](#)
- Menyusun dan menyampaikan:
 - Laporan hasil Rapat Koordinasi TKPK (Pasal 25 Permendagri No. 42/2010);
 - Laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (LP2KD) kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42/2010)



Kerjasama yang Diharapkan



4

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya

	PROGRAM	SASARAN
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

	PROGRAM	SASARAN
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
	d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	j. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	k. PNPM Neighbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
6	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

	BLT Bantuan Tunai	Raskin Beras/ Pangan	Jamkesmas Asuransi kesehatan	BSM Pendidikan	PKH Bantuan Tunai Bersyarat
Jenis transfer	Tunai	Beras bersubsidi	Biaya pelayanan kesehatan gratis	Tunai	Tunai dan bersyarat
Sasaran	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Murid dan RT Miskin	RTSM
Jumlah Penerima	18,7 juta RT	17,5 juta RT	18,2 juta RT	4.560.501	810.000 RTSM
Jumlah bantuan	Rp100.000 per bulan	15 kg beras per bulan	Tidak terbatas	Rp561.759 per tahun	Rp 1.287.000 per tahun
Lembaga pelaksana utama	Kemensos	BULOG dan Kemendagri	Kemenkes	Kemendiknas, Kemendagri	Kemensos

Pengertian

Program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi kriteria dan tanggungjawab (kewajiban)nya.

Hak RTSM

Mendapatkan bantuan uang tunai

Tanggung Jawab (Kewajiban) RTSM

Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll).

Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Rumah Tangga (juta RT)	0,500	0,642	0,720	0,816	1,116
Alokasi dana (Rp miliar)	800	1.000	1.100	1.300	1.600
Provinsi	7	13	13	20	25
Kabupaten/Kota	48	70	70	88	103
Kecamatan	337	637	781	946	1.151
Desa/Kelurahan	4.311	7.654	9.068	11.080	13.641
Pendamping	1.305	2.448	3.036	3.452	4.072
Operator & Staf Data	192	279	334	455	510
Koordinator Wilayah	3	8	8	18	23

Sumber: Kementerian Sosial

Perkembangan PKH Sejak Tahun 2007

Indikator:

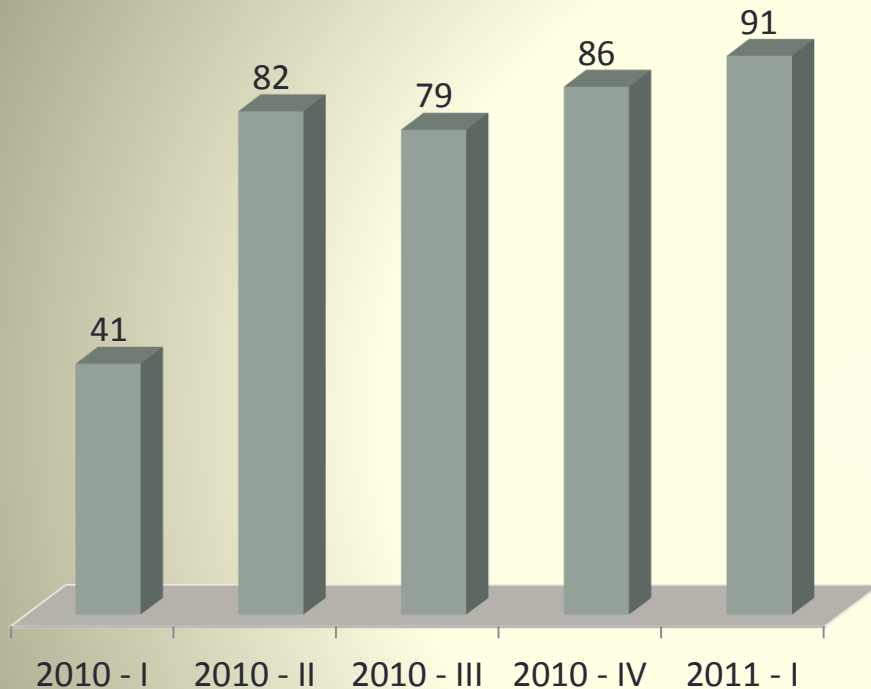
- (1) Verifikasi kepatuhan telah dilakukan
- (2) Verifikasi Keluarga mengetahui kewajibannya
- (3) Program menerapkan penalti atas ketidakpatuhan

- **VERIFIKASI** adalah kunci dari pelaksanaan CCT.
- Di awal 2011, 91% dari penerima manfaat PKH telah diverifikasi
- Juni 2011: terdapat total 1,7 juta anggota keluarga yang dipantau oleh PKH

Anak balita	: 493.693 orang	Anak usia SMP	: 308.159 orang
Anak usia SD	: 867.701 orang	Ibu hamil	: 28.491 orang

PKH telah Berjalan Sebagai Program 'Conditional Cash Transfer'

% Keluarga Sasaran yang terverifikasi

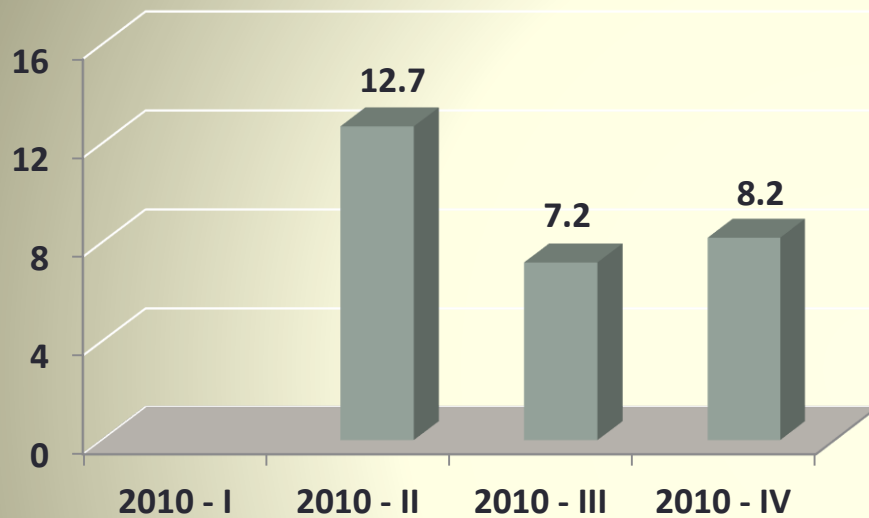


Sumber: Kementerian Sosial

Hasil *spot check* oleh TNP2K menunjukkan bahwa mayoritas keluarga PKH mengetahui tentang kewajiban yang harus dipenuhi.

Verifikasi kepatuhan telah dilakukan

% Keluarga Sasaran yang terkena pemotongan bantuan, Tahun 2010



Sumber: Kementerian Sosial

PENALTI berupa pemotongan bantuan dikenakan bagi keluarga yang tidak memenuhi kewajiban

Pembayaran tahap I tidak ada penalti karena langsung dibayarkan. Verifikasi mulai dilaksanakan setelah pembayaran tahap I.

Penalti telah diterapkan

- Meningkatkan perilaku hidup sehat penerima program
 - Jumlah kunjungan ibu hamil dan ibu nifas ke fasilitas kesehatan meningkat 7-9 *percentage points*;
 - Jumlah balita yang ditimbang meningkat sekitar 15-22 *percentage points*;
 - Persalinan menggunakan fasilitas kesehatan meningkat 5 *percentage points*;
 - Persalinan dibantu petugas kesehatan (bidan terlatih dan dokter) meningkat 6 *percentage points*;
- Dampak PKH lebih kuat di daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik: dampak di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dampak di perdesaan.
- Namun, belum diketahui dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Biasanya diperlukan waktu yang lebih lama dan tidak terlihat pada 1-3 tahun pelaksanaan program.

Dampak PKH Terhadap Kesehatan

- Mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetap di sekolah, dan tingkat ketidakhadiran anak dari keluarga PKH relatif rendah
- Tidak terlihat peningkatan nyata pada tingkat partisipasi SD ataupun SMP
 - Partisipasi SD sudah tinggi
 - Untuk tingkat SLTP terkait faktor a.l.: jadwal penyaluran PKH tidak sesuai waktu pendaftaran (April-Mei), dan jumlahnya tidak selalu mencukupi untuk pendaftaran ke SMP.
- Belum terlihat *spillover effect* PKH terhadap pengurangan pekerja anak (pengurangan sebesar 0,6% dan tidak signifikan).
 - Mekanisme PKH perlu disempurnakan untuk menangani pekerja anak
 - Diduga nilai bantuan tunai tidak cukup besar untuk mengkompensasi pendapatan pekerja anak
 - PKH tidak bisa menjadi satu-satunya program menangani pekerja anak.

Dampak PKH Terhadap Pendidikan

Dampak PKH Terhadap Pengeluaran Konsumsi

- Tahun 2009 Program PKH meningkatkan rata-rata konsumsi perkapita per bulan sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2007
- Transfer tunai PKH digunakan untuk tujuan kesehatan dan pendidikan (seragam, sepatu, suplemen gizi dan biaya transportasi) serta keperluan lain (perbaikan rumah, pembayaran utang)

Dampak lain PKH

- PKH memberi *spill-over effect* pada keluarga yang tidak menerima program (namun masih di kecamatan yang sama), antara lain:
 - Jumlah kunjungan bumil meningkat (4 *percentage points*)
 - Anak usia 0-5 tahun yang ditimbang meningkat sekitar 7 *percentage points*.
 - Persalinan lebih banyak (8 *percentage points*) dilakukan di fasilitas kesehatan.

Arah Perluasan PKH (1)

- **Penargetan**
 - Data penerima PKH bersumber dari Basis Data Terpadu
 - Peserta PKH adalah berbasiskan keluarga
 - Otomatis kepesertaan Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga PKH
- **Pembayaran**
 - Dilakukan tepat waktu untuk mendukung peningkatan pendaftaran di sekolah
 - Pembayaran menggunakan rekening penerima (GIRO online) dan pembayaran via bank (untuk sekaligus meningkatkan *financial inclusion*)
 - Pembukaan rekening bank membutuhkan KTP
 - Pembayaran untuk keluarga penerima PKH yang baru dilakukan minimal 2 kali setahun

Arah Perluasan PKH (2)

- **Prinsip Cakupan**

- 2012 PKH di sedikitnya 1 kabupaten/kota di setiap provinsi
- Mulai 2012 ekspansi di kabupaten yang sama di setiap provinsi (Prinsip Saturasi)
- Prioritas daerah dengan angka kemiskinan tinggi
- 2014 cakupan keluarga sasaran meliputi seluruh keluarga sangat miskin

- **Perencanaan 2012**

Lokasi	Jumlah Keluarga
Keluarga di 8 provinsi baru	120.000
Keluarga di kab/kota baru, di provinsi yang sudah ada PKH	100.000
Keluarga di kecamatan baru, di kab/kota yang sudah ada PKH	180.000
Total tambahan keluarga baru 2012	400.000

Sumber: Kementerian Sosial dan TNP2K

PERENCANAAN PKH s/d 2014

	2011	2012	2013	2014
Keluarga sasaran (juta)	1,116	1,516	2,4	3,0
Provinsi	25	33	33	33
Kabupaten/Kota	103	166	350	500
Kecamatan	1.151	1.551	2.667	3.342
Desa	13.641	21.471	29.301	37.131
Kebutuhan dana (Rp triliun)		1,8	3,2	4,2

Sumber: Kementerian Sosial dan TNP2K

Catatan: Agar dapat dialokasikan 2 kali pembayaran bagi keluarga sasaran baru di tahun 2013 (sebesar 884 ribu keluarga), maka diperlukan aktifitas persiapan pembayaran di tahun 2012. Akan ada dampak pada komposisi biaya administrasi, namun hal tersebut dapat dibenarkan karena akan menciptakan efisiensi pelaksanaan program di tahun anggaran berikutnya.

KOMPLEMENTARITAS?

PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL

Keluarga PKH
(*Demand Side*)

Fasilitas Pendidikan,
Kesehatan, & Rumah
Singgah (*Supply Side*)

Kementerian Sosial

Memastikan kesediaan Keluarga untuk mengikuti program: Pendampingan, Pemantauan Kepatuhan, dan Pembayaran

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan

- Layanan fasilitas pendidikan & kesehatan,
- Pencatatan kehadiran di fasdik/faskes untuk verifikasi kepatuhan program → tugas tambahan bagi staf fasdik/faskes

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial

- Layanan rumah singgah (*shelter*) bagi anak jalanan dan pekerja anak.

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM MENGUNAKAN BASIS DATA TERPADU

RASKIN

JAMKESMAS

PKH

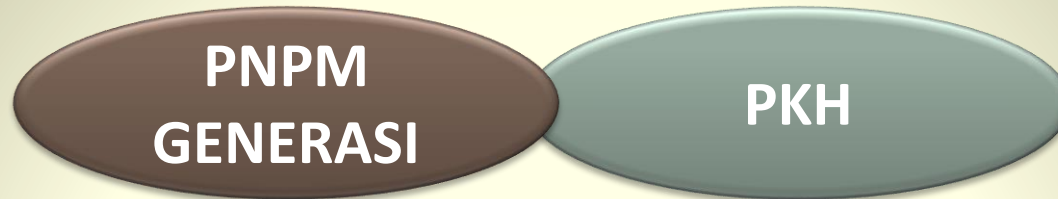
**BANTUAN
PENDIDIKAN**

- Karena mencakup keluarga sangat miskin, maka penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga miskin.
- Penggunaan Basis Data Terpadu yang difasilitasi oleh TNP2K diarahkan kepada komplementaritas program

STRATEGI NASIONAL BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA - KLASTER 1 (INTEGRATED FAMILY BASED SOCIAL ASSISTANCE)

		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin
1 Resiko Kesehatan	Kesehatan Dasar ↑ ↓ Catastrophic	PKH	Jamkesmas (Seluruh peserta PKH otomatis peserta Jamkesmas)	
2 Keberlanjutan Pendidikan	Pendidikan Dasar ↑ ↓ Pendidikan Tinggi	PKH (s/d SLTP)	Bantuan pendidikan (Terintegrasi memastikan keberlanjutan jenjang, Seluruh peserta PKH otomatis mendapatkan bantuan pendidikan)	
3 Guncangan Ekonomi	Ketidakmampuan ↑ ↓ Dampak kebijakan	PKH	Raskin	
		Cash for work		Bantuan tunai
		Pada kondisi krisis dimungkinkan program perlindungan lainnya		

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM (2)



- PNPM Generasi adalah *Community Conditional Cash Transfer*, yang seyogyanya merupakan komplementer dengan PKH → Komplementaritas program Klaster I dan Klaster II.
- Sinkronisasi lokasi PKH dengan lokasi PNPM Generasi.
- Sinkronisasi kegiatan Pendamping PKH dan Fasilitator PNPM.



Terima Kasih